

MENEMBUS BATAS IDEOLOGI **Studi Kualitatif Fenomenologi *Collective Political Action* (CPA)** **Presiden Mahasiswa**

Tessa Revananda Putri, Achmad Mujab Masykur

Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Sudarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

tessa.revananda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, *major prosodic features* dan dokumen. Subjek penelitian berjumlah empat orang dari teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian presiden mahasiswa memaknai statusnya sebagai tanggung jawab dan kesempatan untuk bermanfaat lebih besar. Salah satu rasa tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam *collective political action* pada aksi nasional 21 Mei 2015. *Collective political action* presiden mahasiswa sebagai wujud rasa nasionalisme. Presiden mahasiswa mengadvokasikan langsung permasalahan bangsa Indonesia terkait kenaikan harga BBM, UKT, kuliah lima tahun, kasus korupsi, dan perpanjangan kontrak Freeport kepada Presiden Jokowi. Presiden mahasiswa memandang advokasi/negosiasi sebagai salah satu metode efektif. Presiden mahasiswa memaknai gerakan mahasiswa sebagai gerakan besar, masif, dan memiliki pola. Gerakan mahasiswa murni gerakan moral, *clear* dipisahkan dari gerakan politik praktis. Faktor yang *memengaruhi* pembentukan *collective political action* presiden mahasiswa yaitu ideologi presiden mahasiswa, internalisasi nilai-nilai pengasuhan, dan karakteristik kepribadian politik

Kata kunci: presiden mahasiswa; *Collective Political Action* (CPA), ideologi, kepribadian politik

Abstract

This study used to qualitative method with phenomenological perspective. The collecting data used interview, major prosodic features, and study of document. The responden in this study are four president of the students and used purposive sampling. Four president of the students interpreted his status as a responsibility and chance to be more helpful to others. This responnsibility are formed collective political action in national action 21 Mei 2015. *Collective political action* of the students are visible as a sense of nationalism. Student president were advocated directly about Indonesian nation's problems such as price increases BBM, obscurity mechanism UKT, five-year tuition policy, an increased in corruption case, and Freeport contract extention to the president Jokowi. The president considered that the student advocacy or negotiation as one of the effective methods. President of the students interpreted that students movement as a massive movement, large, and has a pattern. The student movement purely moral movement, clearly apart from the practical political movement. Factors that influenced the formation of collective political action in which the student president: ideology, internalizing the values of parenting, and political personality characteristics

Keywords: Student president, *Collective Political Action* (CPA), ideology, political personality

PENDAHULUAN

Rangkaian aksi nasional 21 Mei 2015 merupakan suatu gerakan mahasiswa dalam suatu aksi politik kolektif (*collective political action*). *Collective Political Action* (CPA) secara spesifik merupakan sebuah strategi, untuk memengaruhi suatu kebijakan pemerintah, dalam konteks gerakan sosial (Klandermans dalam Sears, Huddy, & Jervis 2003). Sztomka (2010), mendefinisikan gerakan sosial adalah salah satu bentuk utama perilaku kolektif. Secara formal, gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektivitas kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu guna menunjang atau menolak suatu perubahan yang terjadi di dalam kelompok atau masyarakat, meliputi upaya kolektivitas itu sendiri (Sztompka, 2010). Penelitian yang berjudul *Protest Reconsidered: Identifying Democratic and Civic Engagement Learning Outcomes* (Protes

Dipertimbangkan Kembali: Mengidentifikasi Hasil Pembelajaran Demokrasi dan Keterlibatan Sipil), Biddix, Somers, dan Polman (2009), dalam Jurnal *Innov High Educ* Vol 34, halaman 133-147, menunjukkan tentang hasil pembelajaran demokrasi dan keterlibatan warga dari suatu kampus.

Secara konsekuen, perbedaan suara di antara aktivis mahasiswa dalam rangkaian aksi nasional 21 Mei 2015 telah melahirkan perpecahan di antara suara mahasiswa itu sendiri. Adanya isu tunggangan politik di dalam rangkaian aksi, diduga melatarbelakangi peristiwa jamuan makan malam di istana negara oleh presiden Jokowi. Sebanyak 30 presiden mahasiswa yang tergabung di dalam BEM SI diundang untuk menghadiri jamuan makan malam.

Kedua hal tersebut menjadi sebuah pemicu sekaligus sarana propaganda pihak lain untuk memecah suara aktivis mahasiswa. Kelompok kontra memandang negatif terhadap kehadiran beberapa Presiden mahasiswa yang hadir dalam jamuan makan malam presiden Jokowi. Sebaliknya, beberapa Presiden mahasiswa yang menghadiri undangan jamuan makan malam, memandang bahwa cara tersebut diyakini efektif untuk dapat merubah kebijakan presiden Jokowi dalam mengentas isu kenaikan harga BBM, mekanisme Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri, perpanjangan kontrak *freeport*, dan isu nasional lain. Advokasi langsung yang dilakukan di dalam jamuan makan malam oleh beberapa presiden mahasiswa bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap gerakan mahasiswa. Melainkan salah satu metode di dalam perjuangan gerakan mahasiswa selain aksi dan demonstrasi.

Penyebab langsung dari tindakan kolektif, berakar dari individu-individu yang memiliki pengalaman ketidakpuasan atau kecemasan. Pada dasarnya, ketidakpuasan tersebut terlihat dari sikap protes yang ditunjukkan oleh individu. Aksi demonstrasi, boikot, blokade, dan situs kependudukan termasuk dalam partisipasi politik inkonvensional (Barnes dan Kaase, dalam Sears dkk, 2003). Kandermand dan Roggerband (2007) menyatakan bahwa, partisipasi gerakan merupakan bagian dari aksi kolektif, yang berakar pada identitas kolektif. Identitas kolektif tersebut berhubungan dengan kognisi bersama dari sebuah kelompok tertentu. Sarwono dan Meinarno (2014, h.170) menjelaskan bahwa identitas kolektif mengacu pada identitas sosial individu di dalam kelompok. Tajfel (dalam Cottam, Uhler, Mastors, dan Preston, 2014, h.80), identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri seorang individu, yang berasal dari pengetahuan tentang keanggotaan individu di dalam sebuah kelompok sosial. Hogg dan Abrams (dalam Sarwono dan Meinarno, 2012, h.253) identitas merupakan hal penting bagi setiap individu untuk mendorong diri dan menganggap diri memiliki identitas dan harga diri yang positif.

Pada mahasiswa, pembentukan identitas kelompok dimulai sejak mahasiswa beraktivitas di kampus. Mahasiswa membentuk *student government* sendiri, lalu kemudian membentuk kelompok-kelompok mahasiswa. Sherif (dalam Gunarsa & Gunarsa, 2010, h.91), merumuskan secara umum, definisi mengenai kelompok sosial yaitu: suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua atau lebih individu yang melakukan suatu interaksi sosial yang cukup intens dan teratur, terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas sebagai kesatuan sosial. Cooley (dalam Gunarsa & Gunarsa, 2010, h.92), membedakan kelompok sosial tersebut menjadi *primary group* dan *secondary group*. Partisipasi psikologis para aktivis mahasiswa, pada rangkaian aksi nasional 21 Mei 2015, berimplikasi terhadap suatu kesadaran akan realitas politik yang ada. Kebijakan pemerintah dinilai sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat. Para aktivis mahasiswa menyadari, terdapat kesenjangan fenomena sosial tertentu seperti: harga BBM yang melambung tinggi dan dikembalikan ke pasar, praktik KKN yang semakin merajalela, UKT yang membebankan biaya pendidikan tinggi, batas kuliah lima tahun, perpanjangan kontrak Freeport

dan sebagainya. Kesadaran akan realitas politik yang dirasakan para aktivis mahasiswa, terlahir dari adanya sebuah persepsi terhadap kondisi bangsa.

Penelitian politik tentang *The Political Consciousness of Adolescent: Normal School Students vs Children of the Streets* (Kesadaran Politik Remaja: Anak Sekolah vs Anak Jalanan), dalam *Jurnal Russian Education and Society* Vol 52, No 10, halaman 19-42 (Kasamara & Sorokina, 2010). Penelitian tersebut menyelidiki tentang perbedaan kesadaran politik pada anak remaja sekolah dengan remaja anak jalanan di Rusia. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks positif, Rusia digambarkan sebagai negara yang besar oleh sebagian besar remaja sekolah. Sedangkan oleh remaja anak jalanan, hanya satu dari lima sampel yang dapat menggambarkan Rusia seperti itu.

Ahmadi (2009, h. 147), menjelaskan bahwa mahasiswa pada garis besarnya memiliki peranan sebagai berikut (a) *agent of change*, (b) *agent of development*, (c) *agent of modernization*. Mahasiswa perlu mempunyai aktivitas sosial. Aktivitas ini bisa didapatkan melalui keterlibatan mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menyadari bahwa tugas utamanya adalah belajar dalam bidang ilmu yang ditujunya, juga tahu bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dapat memberikan banyak manfaat (Djojodibroto, 2004, h.99). Alasan terakhir yaitu setiap mahasiswa memiliki konsep tersendiri dalam mendefinisikan mahasiswa berdasarkan peran akademis dan persoalan moral. Adapun faktor pembentuk dari alasan-alasan pada hasil penelitian tersebut karena, terdapat proses edukasi dan ideologisasi melalui pelatihan dan diskusi di internal maupun eksternal organisasi. Penelitian yang berjudul *Protest Reconsidered: Identifying Democratic and Civic Engagement Learning Outcomes* (Protes Dipertimbangkan Kembali: Mengidentifikasi Hasil Pembelajaran Demokrasi dan Keterlibatan Sipil), Biddix, Somer, dan Pollman (2009) dalam *Jurnal Innov High Educ* Vol 34, halaman 133-147, menunjukkan tentang hasil pembelajaran demokrasi dan keterlibatan warga dari suatu kampus.

Collective political action yang ditunjukkan oleh para presiden mahasiswa aktivis aksi nasional 21 Mei 2015 tentu tidak terlepas dari ideologi. Downs (dalam Hidajat, 2009) mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat asumsi dasar normatif maupun empiris, mengenai sifat dan tujuan manusia atau masyarakat, agar dapat digunakan untuk mendorong serta mengembangkan tertib politik. Chaplin (2011, h.237) menyebut ideologi sebagai suatu sistem kompleks mengenai kepercayaan atau keyakinan. Campbell, Converse, Miller dan Stokes (dalam Cottam, Beth, Elena, dan Thomas, 2012, h.215) menjelaskan, bahwa nilai dan sistem keyakinan politik merupakan bagian dari pembentuk ideologi. Ideologi tersebut merupakan suatu struktur yang sangat rumit, tersusun rapat, dan mencakup luas, dari sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan seseorang. Penelitian Thomas (1971), yaitu tentang *Family Correlates of student Political Activism*, dalam *Jurnal Developmental Psychology* (Hubungan) (pengaruh) Keluarga pada Aktivisme Politik Mahasiswa) Vol. 4, No 2 halaman 206-214. Penelitian Thomas tersebut menguraikan tentang bagaimana pengaruh ideologi politik (liberal dan konservatif) keluarga kelas menengah atas di Amerika Serikat terhadap model aktivisme mahasiswa. Adapun variabel bebas adalah *permissiveness*, konflik keluarga, interaksi keluarga, kehangatan, dedikasi orangtua terhadap isu tertentu, dan pendidikan politik oleh orangtua. Sementara variabel terikat yaitu aktivisme mahasiswa dan aktivitas politik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dinamika aksi politik kolektif (*collective political action*) presiden mahasiswa, aktivis aksi nasional 21 Mei 2015.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan fenomenologis. Fenomenologi merupakan suatu pendekatan dimana peneliti berusaha untuk mengungkap, mempelajari, dan memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas serta unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan (Hendriansyah, 2012). Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, catatan peneliti, dan *major prosodic features* (Smith, Paul, & Michael, 2009). Fokus penelitian yaitu mengungkap, mempelajari, dan memahami fenomena *collective political action* pada presiden mahasiswa aktivis aksi nasional 21 Mei 2015. Penelitian ini menggali secara mendalam bagaimana dinamika kesadaran politik, nilai-nilai pengasuhan, ajaran agama membentuk ideologi dan berpengaruh terhadap perilaku politik presiden mahasiswa aktivis aksi nasional 21 Mei 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu : a) transkripsi, peneliti melakukan transkripsi hasil wawancara dan memindahkan catatan *major prosodic features*, b) peneliti melakukan *overview* berulang kali setelah transkripsi selesai, c) menyusun Deskripsi Fenomena Individual (DFI), peneliti menyusun kembali data transkripsi dan membersihkan pernyataan-pernyataan yang tidak relevan, d) peneliti mengidentifikasi episode-episode umum di setiap DFI, e) mengelompokkan tema-tema dalam setiap episode, f) peneliti menyusun sintesis tema-tema dalam setiap episode.

Setelah melakukan tahap-tahap analisis data, peneliti mengungkap ideologi keempat subjek yang secara keseluruhan berlatar belakang islami. Ditemukan faktor-faktor yang sama pada proses pembentukan ideologi keempat subjek yaitu nilai pengasuhan tanggung jawab dan agamis. Makna tanggung jawab lebih lanjut dapat dijelaskan melalui konsep dalam norma tanggung jawab sosial. Schwartz (dalam Sarwono dan Meinarno, 2012, h.131) menjelaskan tanggung jawab sosial merupakan perbuatan terhadap orang lain tanpa mengharapkan balasan di masa yang akan datang.

Keempat subjek berasal dari latar belakang keluarga berbeda. Status ekonomi, pendidikan, pekerjaan kedua orangtua, dan gaya pengasuhan. Hoff, Laursen, dan Tardif (dalam Santrock, 2012, h.303) menemukan beberapa perbedaan pengasuhan, pada orangtua dengan status sosioekonomi (SSE) lebih rendah, dengan orangtua dengan status sosioekonomi (SSE) lebih tinggi. Keempat subjek dibesarkan dalam pola asuh demokratis, namun memiliki penerapan yang tidak sama. Pola asuh demokratis serupa dengan konsep pola asuh otoritatif yang dikemukakan Baumrind (dalam Santrock, 2007, h.167). Baumrind (dalam Papalia, Sally, dan Ruth, 2009, h.410), pola asuh otoritatif merupakan gaya pengasuhan yang mendorong anak untuk mandiri, namun masih memberikan batasan-batasan kendali yang jelas kepada anak.

Keempat subjek sepakat bahwa ideologi yang berkembang di dalam gerakan mahasiswa ialah beragam. Gerakan mahasiswa secara *clear* merupakan gerakan moral yang terpisah dari gerakan partai politik. Keempat subjek meyakini bahwa terdapat nilai perjuangan masing-masing yang hendak dicapai oleh setiap angkatan gerakan mahasiswa. Nilai perjuangan tersebut mengarah pada keadilan dan kebenaran yang diyakini oleh kerangka berpikir idealis aktivis mahasiswa. Salah satu bentuk nilai perjuangan yaitu terlibat dalam rangkaian aksi nasional 21 Mei 2015. Peneliti juga mengungkap makna terdalam gerakan mahasiswa pada keempat subjek. Subjek STW memaknai gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang memiliki nilai perjuangan dan grup penekan di setiap masa. Pada subjek FI, gerakan mahasiswa dimaknai sebagai gerakan yang memiliki tingkat "keakuan" yang tinggi. Subjek RS memaknai gerakan mahasiswa sebagai gerakan besar, masif, idealis, dengan tindakan heroik. Sedangkan subjek AA memaknai gerakan mahasiswa khususnya saat ini sebagai gerakan yang mengarah pada pengabdian masyarakat.

Latar belakang keempat subjek untuk terlibat langsung dalam rangkaian aksi nasional yaitu semata-mata ingin memperjuangkan hak rakyat Indonesia. Walaupun metode yang digunakan berbeda. Keterlibatan STW, FI, dan AA dalam menghadiri undangan makan malam Presiden Jokowi dilatarbelakangi oleh prinsip dan sejumlah alasan. Subjek STW menilai bahwa menghadiri undangan jamuan makan malam merupakan peluang besar untuk dapat mengadvokasikan langsung permasalahan BBM, UKT, kuliah lima tahun. Bukan satu-satunya metode bergerak dan dinilai efektif untuk menyentuh langsung kebijakan presiden Jokowi.

Baik STW, FI, maupun AA, ketiganya menegaskan bahwa undangan makan malam yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bukanlah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mahasiswa maupun rakyat Indonesia. Hal tersebut karena ketiganya pun turut kembali ke barisan mahasiswa untuk melakukan aksi di depan istana negara pada tanggal 21 Mei 2015. Sementara pada subjek RS, alasan untuk tidak menghadiri undangan Presiden Jokowi dalam jamuan makan malam yaitu karena ingin mempertahankan idealisme mahasiswa. Selain karena subjek juga merupakan koordinator lapangan yang bertugas memimpin jalannya aksi nasional 21 Mei 2015. Keempat subjek baik STW, FI, RS, dan AA memiliki perspektif masing-masing dalam merumuskan pola pergerakan mahasiswa. Keempat subjek juga memiliki pola perilaku politik yang unik dan khas, dalam menentukan cara bergerak untuk merubah kebijakan pemerintah pada saat itu. Hal tersebut menjadi bagian penting di dalam temuan penelitian ini.

Tabel 1
Episode dan tema-tema individual

Episode	Tema-tema			
	Subjek 1 (STW)	Subjek 2 (FI)	Subjek 3 (RS)	Subjek 4 (AA)
Sebelum menjadi Presiden Mahasiswa	Pengasuhan demokratis	Pengasuhan demokratis	Pengasuhan demokratis ketika remaja	Pengasuhan demokratis
	Kedua orangtua menanamkan nilai tanggung jawab, agamis, simpelnya hidup, kemandirian, dan ketegaran	Kedua orangtua menanamkan nilai tanggung jawab, agamis, kepedulian, dan konsekuen	Kedua orangtua menanamkan nilai kedekatan dengan sang pencipta, bersungguh-sungguh, tanggungjawab, kedisiplinan	Kedua orangtua menanamkan nilai bebas-bertanggungjawab, dialogis, kepercayaan diri
	Aktif berorganisasi dan berprestasi sejak masa sekolah-perguruan tinggi	Aktif berorganisasi dan berprestasi sejak masa sekolah-perguruan tinggi	Aktif berorganisasi dan berprestasi sejak masa sekolah-perguruan tinggi	Aktif berorganisasi dan berprestasi sejak masa sekolah-perguruan tinggi
	<i>Life crisis</i> , kedua orang tua bercerai; life plan berubah tidak ingin menjadi Menteri Koordinator	Tokoh kampus dari jurusan	Bercita-cita menjadi ulama kampus	Sejak maba berkeinginan menjadi presiden mahasiswa
Menuju Presiden Mahasiswa	Diusung oleh partai mahasiswa dan gerakan ekstra kampus KAMMI	Diusung oleh HMJ dan Lembaga Dakwah	Diusung oleh HMJ dan Lembaga Dakwah	Independen
	Respon terhadap pencalonan: kaget, bingung, heran	Respon terhadap pencalonan: heran, ragu	Respon terhadap pencalonan: kaget, heran	-
	Termotivasi ingin	<i>Memiliki ambisi</i>	Berdakwah di	<i>Passion</i> di organisasi;

	membantu banyak orang melalui jabatan presiden mahasiswa; mengalahkan diri sen	<i>pribadi untuk merubah kondisi kampus; ingin memimpin dengan gaya khas anak pesantren</i>	lembaga eksekutif mahasiswa; meneruskan perjuangan Rasulullah Saw; belajar sosial politik	ingin bermanfaat lebih besar
	Suasana pemilihan antusias; bertepatan pemilihan presiden RI 2014	Suasana pemilihan antusias; bertepatan pemilihan presiden RI 2014	Suasana pemilihan antusias; bertepatan pemilihan presiden RI 2014	Suasana pemilihan antusias; bertepatan pemilihan presiden RI 2014
Menjadi Presiden Mahasiswa	Ideologi kebenaran dan keadilan	Ideologi islami	Ideologi islami	Ideologi islami
	Gerakan politik nilai	Gerakan tinggi nilai keakuan	Gerakan mahasiswa masif dan besar	Gerakana mahasiswa yang identik dengan pengabdian masyarakat
	Presiden mahasiswa yang paling bertanggung jawab atas pemerintahan mahasiswa	Presiden mahasiswa yang siap belajar, memiliki keberanian, dan tidak boleh minder	Presiden mahasiswa yang amanah, prestis, menarik dan strategis	Presiden mahasiswa amanah dari Tuhan untuk dapat membantu orang lain sebisa yang dilakukan
	Menghadiri undangan Jokowi dan aksi 21 Mei 2015; metode efektif untuk advokasi langsung	Menghadiri undangan Jokowi dan aksi 21 Mei 2015; berprinsip menyampaikan langsung dan memberikan kontrak janji kepada presiden	Aksi 21 Mei 2015; mempertahankan idealisme mahasiswa	Menghadiri undangan Jokowi dan aksi 21 Mei 2015; tujuan akhir <i>memengaruhi</i> kebijakan presiden Jokowi

Collective Political Action (CPA) pada presiden mahasiswa mengarah pada tindakan kolektif yang dilakukan oleh keempat subjek, dalam gerakan mahasiswa pada tanggal 21 Mei 2015. Presiden mahasiswa merupakan pemimpin yang berupaya untuk terus menerus menciptakan perubahan, memotivasi, dan memengaruhi para pengikut. Presiden mahasiswa juga mewakili sistem sosial atau organisasi yang dipimpin. Presiden mahasiswa bertindak sebagai tokoh, simbol, dan wajah sistem sosial atau organisasi. Namun berdasarkan hasil temuan penelitian, didapati *collective political action* (CPA) berbeda padapresiden mahasiswa. *Collective political action* (CPA) pada presiden mahasiswa terbagi menjadi aksi demonstrasi serta aksi demonstrasi yang diiringi negosiasi sebelumnya dengan Presiden Jokowi.

Subjek STW, FI, dan AA termasuk yang memilih upaya resolusi demonstrasi, dengan diiringi negosiasi sebelumnya bersama Presiden Jokowi. Sedangkan subjek RS memilih hanya berpartisipasi pada aksi demonstrasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu hubungan sementara, di mana individu-individu yang terlibat konflik saling tawar menawar (Wirawan, 2010, h.200). Yukl (dalam Wirawan, 2014, h.79), menguraikan peran pemimpin sebagai negosiator ialah mewakili organisasi, baik dengan para anggota organisasi ataupun dengan organisasi lain di luar organisasi. STW, FI, dan AA menempatkan posisi mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah. Mahasiswa dipandang ketiga subjek tidak hanya bertindak sebagai oposisi pemerintah, tetapi juga bertindak secara situasional.

Upaya-upaya negosiasi, partisipasi dalam perubahan kebijakan, interaksi simbolik, termasuk ke dalam upaya tindakan kolektif sosial konstruksionis. *Social constructionist approach* merupakan sebuah pendekatan yang mengelaborasi proses kognitif individu di dalam kerangka diskusi,

mengupayakan pergerakan dengan membaca situasi kondisi. Pembingkaiian (*framing*), identitas (*identity*), dan emosi (*emotion*) merupakan kunci di dalam menentukan tindakan kolektif (Goodwin, Jasper, dan Poletta, dalam Sears dkk, 2003, h.675).

Ketiga subjek meyakini bahwa upaya negosiasi yang dilakukan oleh beberapa presiden mahasiswa pada tanggal 18 Mei 2015 di Istana Negara, efektif mengatasi isu-isu nasional terkait. Upaya negosiasi diyakini mampu merubah keputusan ataupun kebijakan Presiden Jokowi, terutama dalam mengentaskan permasalahan kenaikan harga BBM yang menjerat kebutuhan rakyat Indonesia. Berbeda dengan RS, bagi RS tindakan kolektif pada aksi nasional 21 Mei 2015 tercermin melalui aksi demonstrasi. Keyakinan keempat subjek untuk merubah kebijakan pemerintah, dalam psikologi politik disebut sebagai *political efficacy*. *Political efficacy* sendiri merupakan suatu keadaan ketika individu meyakini, bahwa perubahan atas kebijakan pemerintah berasal dari *external political efficacy* pengaruh individu tersebut.

Sebuah studi tentang gaya kepemimpinan yang ditulis oleh Hermann dan Thomas di Amerika tentang pengambilan keputusan-kebijakan, toleransi terhadap konflik, motivasi presiden dalam memimpin, strategi untuk manajemen informasi, dan resolusi konflik, menunjukkan terdapat dua dimensi dari gaya kepemimpinan. Kebutuhan untuk berkuasa dan pengambilan keputusan, dan kompleksitas kognitif atau sensitifitas memainkan peran terhadap kontrol perilaku untuk membuat suatu kebijakan, (Houghton, 2009, h.104). Greenstein (dalam Houghton, 2009, h.101), mengemukakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh individual pemimpin, membuat suatu pola pembentukan tingkah laku yang berbeda. Hal tersebut terbentuk dari pengalaman, cara berpikir, atribusi dari kepribadian dan gaya kepemimpinan setiap individu.

Kebutuhan akan kekuasaan atau dominansi merupakan sebuah karakteristik kepribadian yang selama ini telah dipelajari secara luas dan dikaitkan dengan jenis-jenis perilaku, dan gaya-gaya interaksi yang spesifik dengan orang lain. Secara khusus, para pemimpin yang memiliki kebutuhan psikologis akan kekuasaan yang semakin tinggi, akan semakin dominan dan asertif pada gaya kepemimpinan mereka pada saat menjabat dan menuntut kontrol yang lebih besar atas peran bawahan serta keputusan-keputusan kebijakan (Cottam, Beth, Elena & Thomas, 2012, h.46). Fodor dan Smith (dalam Cottam, Beth, Elena dan Thomas, 2012, h.47), menemukan bahwa para pemimpin yang memiliki kebutuhan tinggi akan kekuasaan akan lebih berkaitan dengan pendindasan, penekanan pada pengambilan keputusan dan diskusi terbuka di dalam kelompok-kelompok, dibandingkan yang memiliki kebutuhan rendah akan kekuasaan.

Perbedaan *collective political action* keempat subjek secara tidak langsung dilatarbelakangi oleh berbagai faktor pendukung. Faktor-faktor tersebut meliputi: 1) proses internalisasi nilai pengasuhan, 2) pengalaman, 3) cara berpikir yang membentuk identitas kepribadian serta gaya kepemimpinan yang khas pada masing-masing subjek. Pada subjek STW, internalisasi nilai "*do what should you do, not do what you can do*" dari ayah, membentuk pola berpikir subjek untuk terus melakukan upaya-upaya kebaikan di dalam gerakan mahasiswa. Begitu pula dengan subjek FI yang menginternalisasikan nilai cuek tapi peduli dari ayah. Nilai bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah pada subjek RS. Maupun nilai bebas bertanggung jawab pada subjek AA, yang terwujud pada pola komunikasi dialogis.

Perbedaan *collective political action* (CPA) keempat subjek merupakan sebuah keniscayaan. Selama tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing subjek masih sama, yaitu memperjuangkan hak rakyat Indonesia. Namun, hal yang perlu digarisbawahi dari fungsi utama dari seorang presiden mahasiswa yaitu pada hakikat idealisme yang masih terjaga. Sebagaimana keempat subjek sepakat, bahwa gerakan mahasiswa merupakan gerakan moral, bukan gerakan politik praktis nasional.

KESIMPULAN

Collective political action presiden mahasiswa aktivis aksi 21 Mei 2015 terbentuk dalam rangkaian panjang perjalanan. Bermula sejak kecil hingga saat individu tersebut menjadi presiden mahasiswa. Proses pembentukan *collective political action* pada presiden mahasiswa aktivis aksi 21 Mei 2015 dapat dijabarkan dalam beberapa episode. Episode sebelum mahasiswa mengungkap kondisi ketika sebelum menjadi mahasiswa, yaitu dari masa kecil hingga masa memilih perguruan tinggi. Pada episode ini, melahirkan tema-tema pokok yang melatarbelakangi perjalanan individu menuju presiden mahasiswa. Tema-tema pokok tersebut meliputi pengasuhan orangtua, nilai-nilai pengasuhan yang ditanamkan, peran orangtua di dalam pendidikan, pengalaman prestasi dan organisasi di sekolah maupun saat di perguruan tinggi. Tema-tema tersebut akan berpengaruh pada pembentukan karakter masing-masing individu, gaya kepemimpinan, gaya komunikasi, dan nilai-nilai yang diterapkan individu di dalam organisasi.

Pada episode menuju presiden mahasiswa, seluruh pengalaman tersebut secara tidak langsung melatarbelakangi, terpilihnya keempat subjek menjadi presiden mahasiswa. Pengalaman prestasi dan organisasi individu semasa sekolah dan sampai tahun ketiga berada di perguruan tinggi, menjadi modal awal bagi individu untuk menjadi presiden mahasiswa. Selain itu, karena ada dukungan dari lingkungan maupun motivasi baik internal maupun eksternal individu ketika digadang maju sebagai presiden mahasiswa. Pada episode ini tersaji pula, bagaimana setiap subjek mengalami pengalaman unik mulai dari pencalonan, masa kampanye, mekanisme pemilihan, hingga pemaknaan terhadap hasil pencapaian.

Tiga dari empat subjek mengalami pemaknaan yang sama terhadap pemilihan presiden mahasiswa, yaitu sebuah prestasi, sejarah baru, serta pemilihan dengan partisipasi pemilih terbanyak. Pada keempat subjek muncul faktor yang sama, yang menyebabkan tingginya antusiasme mahasiswa terhadap pemilihan, yang tidak lain bertepatan pula dengan pemilihan umum Presiden RI (Pilpres 2014). Sementara faktor lain dari masing-masing individu juga muncul, seperti fasilitas *e-vote* yang memudahkan voters, ketidakoptimalan kinerja pengurus BEM tahun sebelumnya, pecahnya suara koalisi partai mahasiswa.

Pada episode menjadi presiden mahasiswa, mengungkap bagaimana subjek memaknai seluruh rangkaian perjalanan selama menjadi Presiden mahasiswa. Termasuk, mengungkap bagaimana pemaknaan subjek terhadap status presiden mahasiswa, gambaran diri ideal presiden mahasiswa, gerakan mahasiswa, keterkaitan antara gerakan mahasiswa, Pancasila, dan nasionalisme, hingga bagaimana keterlibatan psikologis presiden mahasiswa dalam rangkaian aksi nasional 21 Mei 2015, sebagai bagian dari kesatuan pasca reformasi tahun 1998. Pada episode ini, tergambar bagaimana *collective political action* presiden mahasiswa dapat terlihat, dan memiliki kongruensi terhadap internalisasi nilai-nilai pengasuhan, lingkungan, serta pemaknaan terhadap pengalaman. Seluruh pengalaman tersebut menjadi satu kesatuan utuh yang melatarbelakangi pembentukan ideologi pada presiden mahasiswa.

Gerakan mahasiswa akan terus mengalami dinamisasi-dinamisasi perubahan, bergantung pada pola tuntutan zaman. Sehingga, dibutuhkan penelitian lanjutan yang tidak hanya terbatas pada segmentasi penggambaran fenomena individual. Melainkan, juga dapat mengungkap lebih dalam terhadap rekam jejak peristiwa, dan pola gerakan mahasiswa 20 tahunan yaitu melalui pendekatan studi kasus. Peneliti selanjutnya dapat membahas kasus dibalik gerakan mahasiswa 1998. Peneliti selanjutnya dapat mengungkap, bagaimana keterlibatan psikologis para aktivis mahasiswa tahun 1998 yang saat ini telah menduduki jabatan-jabatan fungsional di pemerintahan. Peneliti selanjutnya dapat pula mengungkap, bagaimana kondisi psikologis para saksi sejarah tersebut. Khususnya, ketika mengetahui empat rekan sesama aktivis ‘tertembak

mati'. Hal tersebut menjadi suatu fenomena menarik dan hingga saat ini kasus kematian keempat aktivis tersebut masih menjadi misteri dibalik reformasi. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan pendekatan studi kasus guna mengungkap lebih dalam fenomena gerakan mahasiswa, pada variabel psikologis terkait

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (2009). *Ilmu sosial dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Biddix, J. P, Somers, P.A., & Polman, J.L. (2009). Protest reconsidered: Identifying democratic and civic engagement learning outcomes. *Innov High Educ*, 34, 133-147.
- Chaplin, J. (2011). *Kamus lengkap psikologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cottam, Martha L., Beth, D.U., Elena, M., & Thomas, P. (2012). *Pengantar psikologi politik* (ed. Kedua). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Djojodibroto, R. (2004). *Tradisi kehidupan akademik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Gunarsa, Y. S. & Gunarsa, S.D. (2012). *Psikologi untuk keluarga*. Jakarta: Penerbit Libri.
- Hendriansyah, H. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidajat, I. (2009). *Teori-teori politik*. Malang: Setara Press.
- Houghton, D. P. (2009). *Political psychology: Situation, individuals, and cases*. Madison, New York: Taylor & Francis Group.
- Kasamara, V. A. & Sorokina, A. A. (2010). The political consciousness of adolescents: Normal school vs children of the streets. *Russian Education and Society*, 52(10), 19-42.
- Klandermans, B & Roggeband, C. (2007). *Handbook of social movements across discipline*. New York: Springer.
- Papalia, D. E., Sally, W. E., & Ruth, D. F. (2009). *Human Development*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sarwono, S. W., & Meinarno, E. A. (2012). *Psikologi sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sears, D. O., Huddy, L., & Jevis, R. (2003). *Oxford handbook of political psychology*. Madison, New York: Oxford University Press.
- Santrock, J. W. (2012). *Perkembangan sepanjang rentang kehidupan (Life span development)* (ed. kedua). Jakarta: Erlangga.
- Smith, J. A., Paul, F., dan Michael, L. (2010). *Interpretative phenomenological analysis: theory, method, and research*. London: Sage Publication.
- Sztompka, P. (2010). *Sosiologi perubahan sosial*. Bandung: Prenada Media Grup
- Thomas, E. L. (1971). Family correlates of students political activism. *Developmental Psychology*, 4(2), 205-214.

Wirawan. (2013). *Kepemimpinan, teori, psikologi, perilaku organisasi, aplikasi dan penelitian: contoh aplikasi untuk kepemimpinan wanita, organisasi bisnis, pendidikan, dan militer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.